

**EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KECAMATAN
BEUTONG ATEUH BANGGALANG KABUPATEN NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH**

Ikhtiar Rahmatullah^{*)}, Annisa Mu'awanah Sukmawati²⁾
¹⁾Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Teknologi Yogyakarta

ABSTRAK

Evaluasi program kebijakan pembangunan adalah langkah strategis agar implementasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sejalan dengan itu, evaluasi juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Program pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat di daerah tertinggal terhadap pelayanan infrastruktur dasar daerah tertinggal berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun jika di lihat dari program kebijakan pembangunan di daerah-daerah masih tertinggal dan masih banyak insfrastruktur yang belum tersedia, baik dari bidang teknologi atau lainnya.

Penelitian berlokasi di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan *purposive sampling* kepada empat narasumber. Analisis dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi implementasi program kebijakan pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Beutong Ateuh masih belum efektif karena masih banyak program yang belum diimplementasikan sebagaimana standar program pembangunan daerah tertinggal seperti yang tertera di dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembinaan daerah tertinggal. Di sisi lain, terdapat banyak kendala dalam rangka menjalankan program. Adapun kendala-kendala tersebut dikarenakan berbagai macam sebab, yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang masih sulit, dan masih kurangnya rasa memiliki oleh masyarakat sehingga semua yang telah dibangun dengan mudah mengalami kerusakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi program kebijakan pembangunan daerah tertinggal, dimana riset ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang evaluasi program kebijakan pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, juga untuk memperlihatkan dampak program bagi pembangunan daerah yang tertinggal.

Kata kunci: *Evaluasi Program, Kebijakan Pembangunan, Daerah tertinggal,
Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang*

ACC 24 Mei 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that are difficult to decipher but appear to start with 'A' and 'M'.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT
POLICY PROGRAM FOR LADING AREA IN BEUTONG ATEUH
BANGGALANG DISTRICT, NAGAN RAYA REGENCY, ACEH PROVINCE**

Ikhtiar Rahmatullah^{*}), Annisa Mu'awanah Sukmawati¹⁾

¹⁾ *Urban and Regional Planning Study Program, Faculty of Science and Technology,
University of Technology Yogyakarta*

ABSTRACT

Evaluation of development policy programs is a strategic step so that the implementation of programs and activities is in accordance with the targets set in the planning. Correspondingly, evaluation also serves to improve the efficiency and effectiveness of resource allocation as well as increase management transparency and accountability. The development program is implemented to realize increased access for people in disadvantaged areas to basic infrastructure services for underdeveloped areas based on community empowerment. However, development policy programs in the regions are still lagging behind and there is still a lot of infrastructure that is not yet available, either from the technology sector or other fields.

This research was conducted in Beutong Ateuh Banggalang District, Nagan Raya Regency, Aceh Province. This study aims to evaluate the implementation of development policy programs for underdeveloped areas in Beutong Ateuh Banggalang District, Nagan Raya Regency. The research uses qualitative research methods with a case study approach. In collecting data, this study uses interviews, observation and documentation. Data was collected by purposive sampling to four sources. The analysis was carried out using a qualitative descriptive analysis technique.

The results of this study indicate that the evaluation of the implementation of the development policy program for underdeveloped areas in Beutong Ateuh District is still not effective because there are still many programs that have not been implemented according to the standard development programs for underdeveloped areas as stated in the Regulation of the Minister of Villages PDT No. 5 of 2020 concerning the development of disadvantaged areas. On the other hand, there are many obstacles in running the program. The obstacles are due to various reasons, such as the low quality of human resources, high poverty rates, limited infrastructure and accessibility of areas that are still difficult, and the community still lacks a sense of belonging so that everything that has been built is easily damaged.

This research is expected to contribute ideas and input for the government in evaluating development policy programs for underdeveloped regions, where this research is expected to be able to provide new references on evaluation of development policy programs for underdeveloped regions. In addition, it is also to show the impact of the program on the development of underdeveloped regions.

Keywords: *Program Evaluation, Development Policy, Underdeveloped Regions, Beutong Ateuh Banggalang District*

ACC 24 Mei 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. H. H.', located in the upper right quadrant of the page.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Halim. 2013 Model Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Studi Kasus di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Jurnal Humanity Vol.8 No.2, Maret 2013, 2. Diakses pada 8 Februari 2021 pukul 14.00 wib. Dari, <https://media.neliti.com>

Almasdi dan Suarman. 2013 STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN. Pekanbaru: Lembaga Penelitian Universitas Riau, Kampus Bina Widya. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 126-139. Diakses pada 17 Desember 2020 pukul 12.00 wib. Dari, <https://media.neliti.com/media/publications/82444-ID-strategi-pengembangan-daerah-tertinggal.pdf>

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 2014. KAJIAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS DAN DAERAH TERTINGGAL. Diakses pada 06 Februari 2021 pukul 11.00 wib. Dari, <http://kawasan.bappenas.go.id>

BPS (Badan Pusat Statistik). 2019. Statistik Daerah Kabupaten Nagan Raya. BPS: Kabupaten Nagan Raya

BPS (Badan Pusat Statistik). 2019 Kecamatan Beutong Ateuh Dalam Angka. BPS: Kabupaten Nagan Raya

Endah Djuwendah, Hesti Hapsari, Eddy Renaldy & Zumi Saidah. STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN GARUT. Universitas Padjadjaran. Diakses pada 03 Januari 2021 pukul 12.00 wib). Dari, <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/01/6-Strategi-Pengembangan-Daerah-Tertinggal.pdf>

Endang Mulyatiningsih, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses pada 8 Februari 2021 pukul 13.00 wib. Dari, <https://eprints.uny.ac.id>

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, 2015. MEMAHAMI KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses pada 8 Februari 2021 pukul 13.30 wib. Dari, <http://digilib.uinsgd.ac.id>

Kementerian PPN/Bappenas. 2015. Laporan akhir koordinasi strategis percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal untuk mendukung PP. No. 78 Tahun 2014 dan Peps No. 131 Tahun 2015. Diakses pada 05 Januari 2021 pukul 09.00 wib. Dari, http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PemantauanEvaluasi/2016/Laporan_Akhir_2016_1.pdf

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2015-2019. rencana strategis (RENSTRA) 2015-2019. Diakses pada 05 Januari 2021 pukul 15.00 wib. Dari, https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/DITJEN_PEMBANGUNAN_DAERAH_TERTINGGAL.pdf

Linda Setyawati, 2017 Upaya Perbaikan Promosi Teh Hijau Pada Usaha Chin Long Tea dengan Metode *purposive sampling*. Jurnal Manajemen dan *Start-Up Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Agustus 2017. Diakses pada 17 Desember 2020 pukul 15.30 wib. Dari <https://journal.uc.ac.id>

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2017. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Diakses pada 05 Januari 2021 pukul 17.00 wib. Dari, https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/kepmendesapdt_nomor_126_ttg_penetapan_17.pdf

Moleong Lexy J, 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nila Sylvi Ratnadila. 2018 Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal. Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Vol. 12 No. 2, Agustus 2018, 120. Diakses pada 17 Desember 2020 pukul 14.30 wib. Dari, <https://media.neliti.com>

Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. https://idm.kemendesa.go.id/idm_data (Diakses pada 15 Desember 2020 pukul 13.00 wib).

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Diakses pada 06 Februari 2021 pukul 11.00 wib. Dari, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4820>

Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diakses pada 8 Februari 2021 pukul 21.00 wib. Dari, <https://kemendesa.go.id/berita/view/kemendesa/2/tugas-dan-fungsi>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 2015. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019. Diakses pada 04 Januari 2021 pukul 10.00 wib. Dari, <http://www.bphn.go.id/data/documents/15pr131.pdf>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Diakses pada 06 Februari 2021 pukul 10.00 wib. Dari, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL III, 2015-2019. Mengejar Ketinggalan: Pembangunan Daerah Tertinggal. Diakses pada 8 Februari 2021 pukul 20.00 wib. Dari, <https://berkas.dpr.go.id/analisis-apbn-public-7.pdf>

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Suharsimi Arikunto & Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia

Yesyca Mita. 2018 Percepatan Pembangunan di Empat Daerah Tertinggal di Jawa Timur: Perspektif Feminis. *Jurnal Inada* Vol.1 No.1, Juni 2018, 26-54. Diakses pada 17 Desember 2020 pukul 14.00 wib. Dari, <https://core.ac.uk/download/pdf/236430381.pdf>